



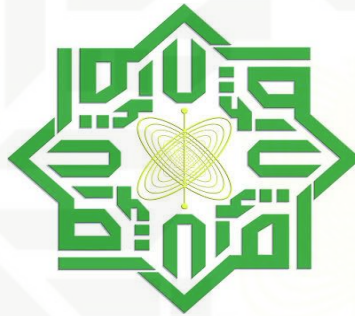
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Anak cipta milik UIN Suska Riau

**“PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK UNTUK PENINGKATAN
PENDATAAN ADMINISTRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU
IDENTITAS ANAK”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh :

WIKDA HASTI BINTARI

1172720018

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Peningkatan Pendataan Administrasi Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”**, yang ditulis oleh:

Nama : WIKDA HASTI BINTARI

NIM : 11727200183

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021
Pembimbing Skripsi

Musrifah, SH., MH.
NIK.130217039

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK UNTUK PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK"* yang ditulis oleh :

Nama : **WIKDA HASTI BINTARI**
 NIM : 11727200183
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., M.H

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II
Lysa Angrayni, SH., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wikda Hasti Bintari (2021): Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Penelitian ini membahas tentang Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Pengurusan Kartu Identitas Anak ini bertujuan meningkatkan pendataan pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak berjalan optimal ditambah dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kartu identitas anak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengurusan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan pendataan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak serta apa yang menjadi faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi. Dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 97 responden, adapun yang di jadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang terselenggara secara optimal. Terlihat bahwa masih banyak anak-anak yang belum memiliki KIA. Sehingga tujuan pemerintah dalam menerbitkan KIA guna untuk meningkatkan pendataan belum berjalan sebagaimana mestinya yang di amanatkan oleh Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sedangkan faktor penghambat dalam pengurusan kartu identitas anak tersebut diantaranya dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai kartu identitas anak, tingkat kesadaran masyarakat akan keperluan kartu identitas anak tidak tinggi, kondisi geografis yang jauh, kurangnya sumber daya manusia atau petugas pelayanan kependudukan, serta adanya oknum yang memanfaatkan situasi.

Keywords : KIA, Pendataan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK UNTUK PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Dwi Wisnu Kristianto (Alm) dan Ibunda Werdio Prihartini tercinta yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga telah bersusah payah untuk membiayai serta memberi dorongan moril dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

2. Kepada abang dan kakak tersayang penulis yakni Eko Wahyudi, Windi Hardiyanto, Pradika Dewantri, Yhana Mustofa, Yutika Kristiyawati, Diah Murniaty Prastiwi, Risma Retnowati dan Evita Sari yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
3. Kepada keponakan tersayang penulis yang selalu memberikan dukungan serta keceriaan kepada penulis yaitu, Naufal Zaki Wihardyan Putra, Arkha Maulana, Callysta Az-Zahra, Annisa Nasreen Shafiyah, Ananda Shefalya Vessela Putri, dan Bilqis Azhara Axelya.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
11. Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
13. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
15. Seluruh keluarga besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
16. Seluruh keluarga besar Kantor Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.
17. Sahabat penulis yakni Cersi Anggraini, Lice Agusnenti, Elsa Zuriani, Selvi Arianti yang selalu menghibur penulis, yang selalu menjadi tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penulis bercerita saat tinggal di Kontrakan Horor Squad dan selalu memberikan support kepada penulis pada saat penyelesaian skripsi ini.

18. Sahabat penulis Lady Gita Noviantri, Risvi Juliani dan Saffana Tuzzakiroh yang sudah menghibur penulis dan memberikan support kepada penulis pada saat penyelesaian skripsi ini.

19. Sahabat penulis Ulfa Humairah Thursina, Yulia Nur Kholifah, dan Triwella Yumelda Ningsih yang sudah memberikan support kepada penulis pada saat penyelesaian skripsi ini.

20. Teman-teman Ilmu Hukum F serta teman-teman Ilmu Hukum angkatan, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Maret 2021

Wikda Hasti Bintari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	25
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.....	29
C. Gambaran Umum Desa Kampung Baru.....	44
BAB III TINJAUAN TEORI	47
A. Tinjauan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	47
B. Tinjauan Tentang Pendataan Administrasi.....	54
C. Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pengurusan Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Faktor Penghambat Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Proses Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi	73
----	---	----

BAB V PENUTUP 81

A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA..... 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
Tabel 1.3	Rekapitulasi Data Anak Usia 0 Sampai Dengan Usia Kurang Dari 17 Tahun di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
Tabel 1.4	Jumlah Populasi dan Sampel	20
Tabel 4.1	67
Tabel 4.2	68
Tabel 4.3	69
Tabel 4.4	71
Tabel 4.5	74
Tabel 4.6	75
Tabel 4.7	77

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi.....	43
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi tiap warganya, tak terkecuali yakni kepada anak. Salah satu aspek yang masih belum dilakukan dan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kesejahteraan anak yakni terkait pendataan pada anak. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada pernyataan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) bahwa selama ini pendataan penduduk yang dilakukan oleh Indonesia hanya dilakukan pada penduduk dengan usia diatas 17, sehingga anak di Indonesia yang pada tahun 2016 berjumlah sekitar 32,4% dari total 258.000.000 penduduk Indonesia atau sekitar 83.592.000 jiwa anak di Indonesia masih belum memiliki kartu identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendataan anak selama ini hanya berupa pencatatan melalui dokumen akta kelahiran.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 mulai melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini sendiri didukung oleh adanya regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sesuai dengan pasal 2 yang menjelaskan bahwa “Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara.” Lalu dalam BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anak menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara dalam pengurusan Kartu Identitas Anak.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, warga wajib memiliki akte kelahiran, anak-anak punya KTP anak, dewasa wajib punya e-KTP. Serta menjamin semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Anak-anak juga harus mempunyai kartu identitas sehingga ketika dewasa nanti anak-anak langsung punya identitas yang terdaftar, supaya anak-anak mandiri, mengurus sekolah sudah punya KTP anak, ini juga sama di ASEAN juga anak-anak punya KTP anak, ungkap Tjahjo Kumolo. Lanjut Tjahjo, KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.¹ Alasan atau latar belakang pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah:

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasikan dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara; dan

¹Muhammad Iqbal, *Ini Penjelasan Lengkap Mendagri Soal Kartu Identitas Anak*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3140935/ini-penjelasan-lengkap-mendagri-soal-kartu-identitas-anak>, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.09.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.²

Program KIA yang mulai dilaksanakan ditahun 2016 sampai saat ini menjadi salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bagi anak-anak yang masih dibawah umur, agar anak-anak di Indonesia mempunyai identitas diri untuk mempermudah dalam pendataan penduduk dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas kependudukan. Keberadaan KIA merupakan upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai saatnya memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saat berusia 17 tahun. Akta kelahiran yang diterbitkan tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan kewarganegaraan seseorang.³ KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak berusia kurang 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota. Peraturan tentang mengenai KIA ini diterbitkan sebagai

²Lihat bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

³Elina Aryanti, *Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional.⁴

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk saat ini mencapai 334.142 orang menurut catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuansing.⁵ Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu Daerah yang juga berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri dalam mengelola berbagai macam hal, termasuk mengenai hal administrasi kependudukan. Menurut data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah peserta didik di Kabupaten Kuantan Singingi yakni sebanyak 77.221 peserta didik.⁶ Sedangkan menurut data pokok pendidikan islam Kementerian Agama, jumlah peserta didik di Kabupaten Kuantan Singingi yakni berjumlah 8.046 peserta didik.⁷ Jadi total keseluruhan peserta didik yang berusia 4 tahun sampai dengan 17 tahun yang belum memiliki identitas diri yang masih bersekolah baik ditingkat pendidikan usia dini hingga ditingkat sekolah menengah atas yang kurang lebih berjumlah 85.267 peserta didik. Data tersebut diluar dari anak yang berusia 0-4 tahun yang belum bersekolah.

⁴Aulia Aziza Mei Erdani, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, hlm. 3.

⁵Kominfo Kuansing, *Per Juni 2020, Jumlah Penduduk Kuansing Capai 334 Ribu Orang*, diakses dari <https://kuansing.go.id/id/blog/per-juni-2020-jumlah-penduduk-kuansing-capai-334-ribu-orang.html>, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.32.

⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *"Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah"*, diakses dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/091400>, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.40.

⁷Kementerian Agama RI, *Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam Jenjang Madrasah TP. 2020/2021*, diakses dari http://emisdep.kemenag.go.id/madrasah_emis/dashboard/-index.php?content=madrasah&action=detail&prov=14&kab=KUANTAN%20SINGINGI, pada tanggal 25 Desember pukul 14.07.

Kabupaten Kuantan Singingi ikut serta melaksanakan kebijakan KIA. Peluncuran awal KIA di lakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi di lapangan Limuno Teluk Kuantan bersamena dengan memperingati Hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi ke-20 pada tanggal 12 Oktober 2019 dan secara simbolik menyerahkan 20 lembar Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas anak yang telah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni berjumlah sebanyak 7.054 keping.

Tabel 1.1
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

No.	KECAMATAN	JUMLAH		
		L	P	L+P
1.	Kuantan Mudik	171	233	404
2.	Kuantan Tengah	1.237	786	2.023
3.	Singingi	323	278	601
4.	Kuantan Hilir	462	664	1.126
5.	Cerenti	21	11	32
6.	Benai	93	89	182
7.	Gunung Toar	77	56	133
8.	Singingi Hilir	356	269	652
9.	Pangean	31	19	50
10.	Logas Tanah Darat	76	62	138
11.	Inuman	507	635	1.142
12.	Hulu Kuantan	24	33	57
13.	Kuantan Hilir Seberang	138	118	256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Sentajo Raya	149	82	231
15	Pucuk Rantau	11	16	27
JUMLAH				7.054

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan KIA di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sebanyak 7.054 keping. Dari data yang tertera memperlihatkan bahwasanya belum tercakupnya penerbitan KIA bagi seluruh anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Terlihat dari tabel tersebut, bahwasannya kecamatan Cerenti menduduki peringkat kedua terendah dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal penerbitan KIA. Yang mana di kecamatan Cerenti hanya terdapat 32 anak yang memiliki KIA. Berikut merupakan nama anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak di kecamatan Cerenti :

Tabel 1.2
Jumlah Anak Yang Memiliki Kartu Identitas Anak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

NO	NIK	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	1409052110100014	Aadillah Miftahul Akbar	Laki-Laki	Cerenti, 18-05-2012	Kampung Baru Timur
2.	1409051506120002	Abar	Laki-Laki	Pulau Bayur, 15-06-2012	Pulau Bayur
3.	1409050702200001	Abbad Rifqi Mustafa	Laki-Laki	Cerenti, 07-02-2020	Pasar Cerenti
4.	1409052607090001	Abdan Abdillah	Laki-Laki	Pesikaian, 26-07-2009	Pesikaian
5.	1409052406140002	Abdi Erzyandra Mustafa	Laki-Laki	Cerenti, 24-06-2014	Kompe Berangin
6.	1409051204140001	Abdilwarits Abrahamaiko	Laki-Laki	Inuman, 12-04-2014	Kampung Baru Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	1409052904040001	Abdul Ahmadani	Laki-Laki	Sikakak, 29-04-2004	Sikakak
8.	1409051411130001	Abdul Aziz	Laki-Laki	Koto Peraku, 14-11-2013	Koto Peraku
9.	1406090801050003	Abdul Ghofur Azhari	Laki-Laki	Tambusai Utara, 08-01-2005	Koto Cerenti
10.	1409052305120001	Abdul Halim Zikra	Laki-Laki	Cerenti, 23-05-2012	Pulau Panjang Cerenti
11.	1409050711180001	Abdul Hanif	Laki-Laki	Sikakak, 07-11-2018	Sikakak
12.	1409050311120001	Abdul Hidayat	Laki-Laki	Pulau Bayur, 03-11-2012	Teluk Pauh
13.	3401082202120002	Abdul Iqbal Safi'i	Laki-Laki	Kulon Progo, 22-02-2012	Pulau Jambu
14.	1405031605140005	Abdul Rahman	Laki-Laki	Kuantan Singingi, 16-05-2014	Koto Peraku
15.	1409052404070001	Abdul Razaq	Laki-Laki	Tanjung Medan, 24-04-2007	Tanjung Medan
16.	1409051512090001	Abdullah Helmizaky	Laki-Laki	Cerenti, 15-12-2009	Pesikaian
17.	1409057003140001	Alikha Naila Putri	Perempuan	Pulau Busuk Jaya, 30-03-2014	Pasar Cerenti
18.	1409054312180001	Ayesha Almahira Rizky	Perempuan	Ladang Panjang, 03-12-2018	Tanjung Medan
19.	1409054510140002	Fahma Adha Fazda	Perempuan	Kompe Berangin, 05-10-2014	Kompe Berangin
20.	1409055207180001	Felicia Elvareta Wale	Perempuan	Pekanbaru, 12-07-2018	Kampung Baru Timur
21.	1409052801040001	Fikri Ibnu Fazda	Laki-Laki	Pangean, 28-01-2004	Kompe Berangin
22.	1409054911070001	Fitri Aulia Fazda	Perempuan	Kompe Berangin, 09-11-2007	Kompe Berangin
23.	1409116607170001	Jennaira Aysila	Perempuan	Pulau Busuk Jaya, 26-07-2017	Teluk Pauh
24.	1409052304200001	M. Fali Zaidan Rabbani	Laki-Laki	Sungai Guntung, 23-04-2020	Pasar Cerenti
25.	1409050901100002	Muhammad Adil	Laki-Laki	Cerenti, 09-01-2010	Koto Cerenti
26.	1409056011140002	Nafisyah Zahra Zuliant	Perempuan	Cerenti, 20-11-2014	Pesikaian
27.	1409054812110001	Namira Disti Jenny Zuliant	Perempuan	Cerenti, 08-12-2011	Pesikaian
28.	1409056904090001	Nuraini Hadi	Perempuan	Cerenti, 29-04-2009	Pulau Bayur
29.	1409056207140001	Qayla Wale Ramadhani	Perempuan	Peranap, 22-07-2014	Kampung Baru Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30.	1409050404180001	Razka Alfariqsy	Laki-Laki	Teluk Kuantan, 04-04-2018	Kompe Berangin
31.	1409054305090002	Syahra Jamila	Perempuan	Cerenti, 03-05-2009	Kampung Baru
32.	1409050509070002	Taufiqqurrahman	Laki-Laki	Cerenti, 05-09-2007	Pulau Panjang Cerenti

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Cerenti. Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa desa Kampung Baru merupakan desa yang paling sedikit yang mana anak yang mempunyai KIA hanya berjumlah 1 orang. Berikut merupakan jumlah anak di desa Kampung Baru yang tercatat di Kantor Kepala Desa Kampung Baru :

Tabel 1.3

Rekapitulasi Data Anak Usia 0 Sampai Dengan Usia Kurang Dari 17 Tahun di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1.	Solikin	Fanniya Al Ghaniy	1409057010170001	Perempuan	Cerenti, 30/10/2017
2.	Deky Anggerianto	Kanza Sabhira Naufalyn	1409055109170001	Perempuan	Cerenti, 11/09/2017
3.	Lisandra	Nadia Uafa	1409056910170001	Perempuan	Cerenti, 29/10/2017
4.	Masrianto	Jihan Tri Anita	1409054101170001	Perempuan	Cerenti, 01/01/2017
5.	Aprizal	Aldo Aditia	1409054907160001	Laki-Laki	Kampung Baru Cerenti, 09/07/2016
6.	Supriadi	Fazya Rafifa	1409054811160001	Perempuan	Kampung Baru, 08/11/2016
7.	Zeldian	Aditia Pratama	1409055611160002	Laki-Laki	Cerenti, 12/09/2016
8.	Alimin	Alditra Priadani	1409055611160002	Laki-Laki	Cerenti, 16/11/2016
9.	Supriadi	Faida Annayla	1409054411150001	Perempuan	Kampung Baru, 04/11/2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10.	Kelana	Naybila	1409056707150004	Perempuan	Cerenti, 27/07/2015
11.	Windi Kurniawan	Citra Elsa Putri	1409055303150001	Perempuan	Cerenti, 13/03/2015
12.	Khairon Toni	Khairinaifa Triantoni	1409056203150001	Perempuan	Teluk Kuantan, 22/03/2015
13.	Pebriadi	Rendi	1409055511150001	Laki-Laki	Cerenti, 15/11/2015
14.	Candra	Setyasih Asmaja	1409055609140001	Perempuan	Cerenti, 16/09/2014
15.	Elvi	Asya Kurnia Algani	1409055104140001	Perempuan	Kampung Baru, 11/04/2014
16.	Jupri	Jessika Berliana Petri	1409056606140001	Perempuan	Pasar Cerenti, 26/06/2014
17.	Sardi Usman	Zayan Putra	1409056802140001	Laki-Laki	Cerenti, 08/02/2014
18.	Perdiansa	Raiza Noprita	1409057011140001	Perempuan	Teluk Kuantan, 30/11/2014
19.	Nenerawa	Neyla Nandia Desfita	1409056012130001	Perempuan	Teluk Kuantan, 20/12/2013
20.	Wagimin	Rasty Qudrata Ainin	1409055101130001	Perempuan	Cerenti, 11/01/2013
21.	Rustam Efendi	Ripan Saputa	1409056003130001	Laki-Laki	Teluk Kuantan, 20/03/2013
22.	Basril	Wahyu Dwi Rafsyah	1303046902130002	Laki-Laki	Sijunjung, 29/02/2013
23.	Atan Afri, SHI	Marwah Tsania Syajurita	1409054709130002	Perempuan	Teluk Kuantan, 07/09/2013
24.	Atan Afri, SHI	Shafa Tsania Syajurita	1409054709130003	Perempuan	Teluk Kuantan, 07/09/2013
25.	Sabeta	Karunia Ramadhan	1409054808130001	Laki-Laki	Kampung Baru, 08/08/2013
26.	Andar Sukandar	Annisa Andriani	1409057009130001	Perempuan	Cerenti, 30/09/2013
27.	Armadi	Jodi	1409056103130001	Laki-Laki	Cerenti, 21/03/2013
28.	Hermaini	Muhammad Dirga	1409055912120001	Laki-Laki	Kampung Medan, 19/12/2012
29.	Lendrizar	Mutia Hellend Desturi	1409055012120001	Perempuan	Teluk Kuantan, 10/12/2012
30.	Raffles	Alisya Maulida	1409055502120001	Perempuan	Kampung Baru, 15/02/2012
31.	Zeldian	Zivara Dwi Aisyah	1409057006120001	Perempuan	Cerenti, 30/05/2012
32.	Marsel., S.Ag	Nadhifah Muthia	1409055901120001	Perempuan	Cerenti, 19/01/2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		Azka			
33.	Asril	Aisa Adira Putri	1409056112110002	Perempuan	Koto Cerenti, 21/12/2011
34.	Erni	Tasiah Mairani	1409056805110001	Perempuan	Kampung Baru, 28/05/2011
35.	Lismar	Marisa	1409055204110002	Perempuan	Kampung Baru, 12/04/2011
36.	Lisandra	Nabila	1409054808110001	Perempuan	Kampung Baru, 08/08/2011
37.	Rivo Sastria	Lucky Saputa	1409055001110001	Laki-Laki	Pulau Panjang Inuman, 10/01/2011
38.	Jamilus	Zaahiyah Hulwah Janovi	1409056805110001	Perempuan	Pekanbaru, 28/06/2011
39.	Suhadak	Az-Zahra Ramadhani	1409054309100003	Perempuan	Cerenti, 03/09/2010
40.	Jalaludin Rahmad	Hidayatul Nuraini	1409056301100001	Perempuan	Kampung Baru, 23/01/2010
41.	Marnius	Delon Romansyah	1409056610100002	Laki-Laki	Kelayang, 25/10/2010
42.	Arianto	Irfan Ramadhan	1409056912010001	Laki-Laki	Cerenti, 29/12/2010
43.	Andar Sukandar	Fatwa Nuraeni	1409057001100001	Perempuan	Cerenti, 30/01/2010
44.	Herdiman	Noviza Adhani	1409056211100001	Perempuan	Tambang, 22/11/2010
45.	Repi Aprizal	Remanda	1409055807090002	Perempuan	Cerenti, 18/07/2009
46.	Rudi	Zaskia Pebi	1409058702090001	Perempuan	Cerenti, 27/02/2009
47.	Yuhendri	Ranti	1409056311090001	Perempuan	Kampung Baru, 23/11/2009
48.	Hermanto	Fikri Firjatulah	1409052303090001	Laki-Laki	Cerenti, 23/03/2009
49.	Hendra	Lailatul Adhawiah	1409052703090001	Perempuan	Cerenti, 27/03/2009
50.	Zainal	Akbar Ramadhan	1409056301090001	Laki-Laki	Cerenti, 23/01/2009
51.	Alimin	Aura Avanza	1409054106090001	Perempuan	Cerenti, 01/06/2009
52.	Dwi Sapta Ade Candra	Vanya Valesca Candra	1409056209090001	Perempuan	Cerenti, 22/09/2009
53.	Fatra Ismail	Syakra Jamila	1409054305090002	Perempuan	Cerenti, 03/05/2009
54.	Yandro	Celsa Tri Kurnia	1409054502090001	Laki-Laki	Tembilahan, 05/02/2009
55.	Lendrizar	Andri Saputra	1409055712090001	Laki-Laki	Teluk Kuantan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

					17/12/2009
56.	Adi Candra	Nurul Fadilla	1409056209080001	Perempuan	Kampung Baru Cerenti, 22/09/2008
57.	Helfizon	Gazena Talita Zahra	1409055010080001	Perempuan	Cerenti, 10/10/2008
58.	Nenerawa	Raya Ramadhani	1409056809080001	Perempuan	Cerenti, 28/09/2008
59.	Neni Deswita	Dinda Aisyah	1409054902080002	Perempuan	Kampung Baru, 09/02/2008
60.	Jupri	Chantika Kurnia Intan	1409055601080001	Perempuan	Pasar Cerenti, 16/01/2008
61.	Sera Abdullah Deyli	Salsabila Ghaniyah Deyli	1409055804080003	Perempuan	Cerenti, 18/04/2008
62.	Seventriadi	Reisya Sepriani Agustina	1409056408080001	Perempuan	Air Molek, 24/08/2008
63.	Elka Syahrial	Zelliana Meisya	1409054705080001	Perempuan	Cerenti, 07/05/2008
64.	Dasril	Dian Pebrianti	1409050602080001	Perempuan	Pl. Kalimantan, 26/02/2008
65.	Alfizon	Aqhni Despianda	1409055212080002	Perempuan	Kampung Baru, 12/12/2008
66.	Hasmi	Pirga Desliandri	1409055105070003	Laki-Laki	Kampung Baru, 11/05/2007
67.	Zulkhairi	Laili Asri Fadillah	1409056707070001	Perempuan	Cerenti, 27/07/2007
68.	Warni	Tobi Mahendra	1409055107070001	Laki-Laki	Cerenti, 11/07/2007
69.	Kelana	Andika Aditya Hepi	1409055608070004	Laki-Laki	Cerenti, 10/08/2007
70.	Lismar	Arjuna Saputra	1409054606070001	Laki-Laki	Kampung Baru, 06/06/2007
71.	Atan Afri, SHI	Sazkia Zulmarita	1409054212070003	Perempuan	Teluk Kuantan, 02/12/2007
72.	Fransi Romelo Asmara	Ianthine Syafa Azzahra	1409054911070001	Perempuan	Peranap, 09/11/2007
73.	Marnius	Siska Cahya Putri	1409055202070001	Perempuan	Kelayang, 12/02/2007
74.	Junasri	Juni Lasari	1409055606070001	Perempuan	Sikakak, 15/06/2007
75.	Andri Wijaya	Joya Anggela	1409054410070002	Perempuan	Cerenti, 04/01/2007
76.	Amnur	Mutia Apifa Amelia	1409055108060001	Perempuan	Kampung Baru, 11/08/2006
77.	Helfius	Rizky Saputa	1409054205060001	Laki-Laki	Cerenti, 02/05/2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

78.	Aswandi	Junisa Pebrianti	1409055806060004	Perempuan	Cerenti, 18/06/2006
79.	Sopia Laga	Chea Helga Mahendra	1409055502060001	Perempuan	Cerenti, 15/02/2006
80.	Ajisman	Kuntum Khairumma	1409056708060001	Perempuan	Cerenti, 27/08/2006
81.	Armadi	Annat Asya Nabila	1409056602060001	Perempuan	Medan, 26/02/2006
82.	Raffles	Gita Septia Diska	1409055609060001	Perempuan	Kampung Baru, 16/09/2006
83.	Ahmad Subarnas	Jelita Pinasti	1409055107060001	Perempuan	Cerenti, 11/07/2006
84.	Elpirus	Tomi Kurniawan	1409055610060001	Laki-Laki	Inuman, 16/10/2006
85.	Mahyudin	Gina Yomisitta	1409055001060001	Perempuan	Cerenti, 10/01/2006
86.	Sucipto	Alfitra	1409056209050003	Laki-Laki	Cerenti, 22/09/2005
87.	Salmi	Arifki Tri Ananda	1409054401050001	Laki-Laki	Kampung Baru, 04/01/2005
88.	Amdani	Lianti	1104035802050003	Perempuan	Kerinci, 16/02/2005
89.	Yusneri	Mai Diva Triani	1409056101050002	Perempuan	Cerenti, 21/05/2005
90.	Encik Eda	Lastriana	1409056403050001	Perempuan	Cerenti, 24/03/2005
91.	Zainal	Imelza Patri	1409054303050002	Perempuan	Pelalawan, 03/03/2005
92.	Alimin	Fitriyana	1409055502050001	Perempuan	Cerenti, 15/02/2005
93.	Pebriadi Ahmad	Aditia Ramadhanu	1409051161150001	Laki-Laki	Kampung Baru, 16/11/2005
94.	Yulizar	Shenya Destri Yurika	1409054112050001	Perempuan	Cerenti, 01/12/2005

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anak di desa Kampung Baru yang tercatat di Kantor Desa Kampung Baru yakni berjumlah 94 orang, dan anak yang mempunyai KIA di desa Kampung Baru hanya terdapat 1 orang. Tentunya ini memperlihatkan bahwasanya belum tercakupnya penerbitan KIA bagi seluruh anak di desa Kampung Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang sudah tertera diatas, maka terdapat fenomena terkait dengan kartu identitas anak, yakni bahwa didesa Kampung Baru hanya terdapat 1 anak yang mempunyai KIA, sementara jumlah anak didesa Kampung Baru tersebut terdapat 94 anak. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai apa pentingnya kartu identitas anak. Banyak orangtua yang merasa acuh dan tidak merasa bahwa kartu identitas itu penting. Dan juga di Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, "dikarenakan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi kurangnya memahami dan tidak menganggap penting dengan kata lain kartu KIA itu hanya butuh ketika anak masuk sekolah saja, jadi belum begitu antusiasnya masyarakat dalam pengurusan KIA Tersebut dibandingkan dengan pembuatan KTP. Kepada masyarakat kabupaten Kuantan Singingi yang membuat KIA anaknya sebaiknya datang langsung ke Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa persyaratan dan tidak dipungut biaya", ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi H. M. Refendi Zukman S.Sos.⁸

Seperti juga yang disampaikan dalam wawancara penulis dengan salah satu staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi bidang Catatan Sipil yakni Bapak Aan Gunadi yang menyebutkan bahwa, "Respon

⁸Indeks Berita, *Kepala Dinas Disdukcapil Himbau kepada Masyarakat Urus Kartu Identitas Anak (KIA)*, diakses dari <https://m.kupaskasus.com/read-4233-2020-07-03-kepala-dinas-discukcapil-himbau-kepada-masyarakat-urus-kartu-identitas-anak-kia.html>, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

orangtua belum maksimal dan ditambah lagi karena pada saat ini sedang pandemi dan sekolah belum maksimal jadi banyak orangtua yang menganggap Kartu Identitas Anak ini belum diperlukan. Yang membuat Kartu Identitas Anak sekarang lebih banyak pada anak yang ingin masuk pesantren, karena Kartu Identitas Anak diperlukan apabila hendak masuk pesantren, ungkapnya”.⁹ Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, beliau mengatakan bahwa, “untuk Kartu Identitas Anak di desa Kampung Baru sendiri masih belum merata dan masih kurang. Banyak orangtua yang tidak paham dan tidak mengerti mengenai KIA tersebut”, ungkap Bapak Adi Candra selaku Kepala Desa Kampung Baru.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta data yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya, banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyelenggaraan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul **“PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK UNTUK PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK”**.

⁹Wawancara dengan Aan Gunadi (staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi bidang Catatan Sipil), pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 11.10 melalui sambungan telepon.

¹⁰Wawancara dengan Adi Candra (Kepala Desa Kampung Baru), pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 di Kantor Desa Kampung Baru Cerenti.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus membahas Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengurusan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan pendataan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak?
2. Apa saja faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin di cari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pengurusan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan pendataan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penyelenggaraan kartu idenitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi serta sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugasnya mengenai pengurusan kartu identitas anak.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian ini dibidang Studi Ilmu Hukum, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penyusunan dari penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, penelitian hukum sosiologis tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya¹¹. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologi hukum yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Lalu untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Oleh sebab itu tidak memuaskan jika mempelajari hukum hanya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan saja (*law in books*), diperlukan kajian bagaimana hukum dalam praktek (*law in action*), karena hukum dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) boleh jadi tidak sama dengan hukum dalam praktek (*das sein*).¹²

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133.

¹²Hajar M, *Model-Model Dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukum atau efektivitas hukum yang mengkaji tentang efektivitas hukum dan dampak-dampak yang di timbulkan oleh hukum. Yang mana penelitian ini tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berupa pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan kemudian di kelola data tersebut dengan rangkaian kalimat yang rinci dan jelas.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan dibatasi di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk dalam hal pembuatan dan pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi. Lalu karena di desa Kampung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru merupakan desa yang paling terendah terkait dengan anak yang memiliki KIA terkhusus di kecamatan Cerenti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti dan Orangtua anak yang berusia kurang dari 17 tahun di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.
- b. Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah 97 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi, 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 1 orang Kepala Desa

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Baru dan 94 orangtua yang memiliki anak yang berusia kurang dari 17 tahun di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.

Tabel 1.4
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Kepala Desa Kampung Baru Cerenti	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Orangtua anak yang berusia kurang dari 17 Tahun di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti	94 Orang	47 Orang	50%

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan serta sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan.

c. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada orangtua anak yang usianya belum menginjak 17 tahun yang berada di desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana penyelenggaraan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, kuisioner/angket terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam data sekunder terdapat:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 135.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹⁶ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, surat kabar dan seterusnya.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 54.

7. Analisis Data

Metode analisa yang data digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilih data, mengolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data-data tersebut. Apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara, angket, dan observasi. Penarikan kesimpulan digunakan dalam penelitian ini yakni metode induktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Yang mana melihat pelaksanaannya hukumnya. Dan melihat hukum di laksanakan di masyarakat dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai Daerah Perantauan orang-orang Minang Kabau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan istiadat serta bahasa Minang Kabau.

Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah di keluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.¹⁷ Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 Kecamatan dengan 151 Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir

¹⁷Riau.go.id, *Kabupaten Kuantan Singingi-Berita-Pemerintah Provinsi Riau*, di akses dari <https://www.riau.go.id/home/content/20/kab-kuantan-singingi#:~:text=Kabupaten%20Kuantan%20Singingi%20pada%20awalnya,Ibu%20Kotanya%20berkedudukan%20di%20Teluk>, pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 13.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kecamatan Cerenti

6. Kecamatan Benai

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs.H. Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan Drs.H.Rusdji S Abrus dengan Drs.H.Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan, Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, dan ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Singingi Hilir
4. Kecamatan Pangean
5. Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Kecamatan Inuman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Pucuk Rantau
9. Kecamatan Sentajo Raya
10. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
11. Kecamatan Benai
12. Kecamatan Cerenti
13. Kecamatan Singingi
14. Kecamatan Kuantan Hilir
15. Kecamatan Kuantan Tengah

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi memberikan perubahan yang drastis untuk negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya Otonomi Daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 januari 2001.¹⁸

2. Geografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0°00 – 1°00 Lintang Selatan dan 101°02 – 101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas

¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan pada 2018 berkisar antara 139,80 – 463,90 mm per tahun.¹⁹

3. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 327.316 jiwa yang terdiri 167.794 jiwa laki-laki dan 159.522 jiwa perempuan. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 50.304 jiwa dan kecamatan yang

¹⁹Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2020*, (Kuantan Singingi: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 9.068 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 167.794 jiwa dan perempuan berjumlah 159.522 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,19. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 108,20 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 100,95.²⁰

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dimana tugas pokoknya adalah kewenangan otonomi daerah dibidang kependudukan pencatatan sipil didaerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah dapat menyusul Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2016 RENSTRA ini dibuat sebagai pedoman dan acuan serta sekaligus dokumen dalam pelaksanaan akuntabilitas yang kinerja yang

²⁰*Ibid.*, hlm. 60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta pokok-pokok program kegiatan yang akan dilaksanakan RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2011 – 2016.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Menyediakan dan merumuskan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan selama lima tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan dan dijadikan pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai baik dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari sumber maupun dari sumber pembiayaan lainnya.
2. Sebagai pedoman resmi bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Untuk memudahkan aparatur dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memahami strategi serta kebijakan program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu lima tahun hingga program dan dapat berjalan lancar, terpadu dan bersinergi.

Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 47 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2001 nama kantor CAPIL ini adalah “Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja”. Pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Penjabaran tugas pokok dinas kependudukan dan tenaga kerja

1. Dinas kependudukan dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten.
2. Dinas kependudukan dan tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 melakukan tentang perubahan nama “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dan Pencatatan Sipil. Dan pada tahun 2016 ini nama kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di ubah menjadi “Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”.

2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Visi:

Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul serta mempunyai arah dalam persaingan semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan focus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki orientasi masa depan , mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi disusun sebagai berikut : “Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif, tepat dan benar.”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan sistim pengendalian data base administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan pengawasan mobilitas penduduk, yang berwawasan kependudukan.²¹

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009 telah ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Susunan Organisasi

²¹Disdukpcapil, diakses dari <https://disdukcapil.kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>, pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 15.25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah datang Penduduk
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan pencatatan sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Perubahan Status anak kewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Seksi sistem informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
 3. Seksi Tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan
 1. Seksi Kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan
3. Seksi Inovasi Pelayanan

4. Tugas, Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Dinas mempunyai fungsi yakni:

1. Perencanaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengkoordinasian dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan kegiatan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pembinaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; pengendalian dan monitoring dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan data;
2. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
3. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan;
5. Pembinaan kepegawaian;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana;
7. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
8. Penyelenggaraan perjalanan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris dibantu oleh Sub Bagian.

Bagian Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Perencanaan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk;
2. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk;
4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan identitas penduduk;
5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk;
6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk;
7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk;
8. Penetapan penyusunan kebutuhan blanko/formulir pendaftaran penduduk;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
10. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk;
11. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pendaftaran penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 (seksi) yakni:

- a) Seksi Identitas Penduduk
- b) Seksi Pindah Datang
- c) Seksi Pendataan Penduduk

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengangkatan, pengesahan / pengakuan anak, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;
2. Penetapan kebijakan pencatatan sipil;
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;
4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak;
5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran dan kematian;
6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;
7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;
8. Penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencatatan sipil;
9. Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen pencatatan sipil;
11. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan sipil;
12. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan sipil;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di bantu oleh Kepala Seksi. Kepala bidang pencatatan sipil membawahkan :

- a) Seksi Kelahiran
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian
- c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data;
2. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data;
4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi kependudukan;
6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan jaringan dan komunikasi data kependudukan;
7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data;
8. Penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang informasi administrasi kependudukan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan;
10. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
11. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu Oleh Kepala Seksi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) Seksi diantaranya :

- a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi

6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi penyiapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

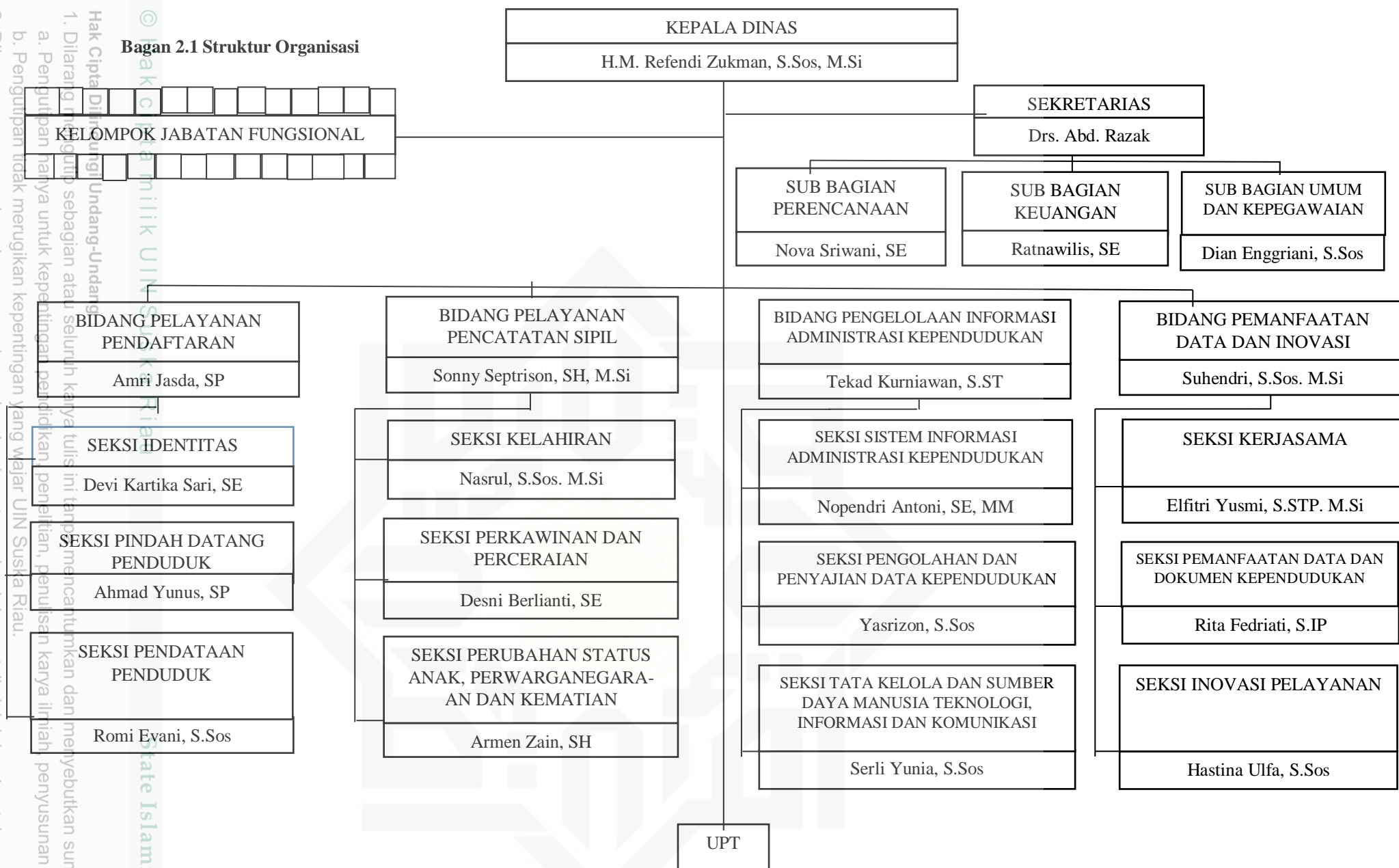
- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu Oleh Kepala Seksi. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi diantaranya :

- a) Seksi Kerjasama
- b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- c) Seksi Inovasi Pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi





C. Gambaran Umum Desa Kampung Baru

1. Geografis Desa Kampung Baru

Desa Kampung Baru berada dalam kawasan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Kampung Baru 6 Km (Km²). Dengan jumlah penduduk 1.106 jiwa dengan 276 KK yang terdiri dari 4 RW dan 8 RT serta terdapat 2 dusun. Dengan luas wilayah yang dimiliki Desa Kampung Baru, kebanyakan dari wilayahnya adalah rumah penduduk. dan fasilitas umum lainnya.

Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis terdiri dari dataran rendah beriklim tropis. Daerah ini memiliki dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu berkisar antara 25 derajat sampai 33 derjat celcius dengan curah hujan rata-rata berkisar 651,0 sampai 1.092,4 mm/tahun.²²

2. Kondisi Penduduk Desa Kampung Baru

Penduduk merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan bangsa. Penduduk asli yang dapat digolongkan pada masyarakat Desa Kampung Baru adalah suku Melayu (mayoritas), Adapun dilihat secara umum penduduk yang berdomisili di Desa Kampung Baru adalah penduduk asli dan penduduk pendatang yang berasal dari Minang Kabau dan Jawa, Batak dan sebagainya.

²²Kantor Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari aspek pendidikan secara umum masyarakat Desa Kampung Baru memiliki tingkat pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Namun masyarakat yang berdomisili di Desa Kampung Baru mayoritas hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD sampai SMA. Sebahagian besar mata pencarian masyarakat Desa Kampung Baru adalah sebagai petani dan pedagang, serta pekerjaan yang lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat Desa Kampung Baru, yang melakukan berbagai macam kegiatan.

3. Agama dan Sosial Budaya

a. Agama

Agama yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kampung Baru mayoritas islam. Walaupun kepercayaan masyarakat berbeda-beda namun masyarakat hidup rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Sebagai masyarakat agamis tentunya menghendaki nilai-nilai agama yang luhur dan universal agar dapat menjiwai kehidupan masyarakat itu sendiri. Di dalam lingkungan Desa Kampung Baru warganya rata-rata menganut agama Islam.

b. Sosial dan Budaya

Dalam kehidupan masyarakat Desa Kampung Baru, terbagi aneka corak dan bentuk adat istiadat yang berkembang sebagai salah satu warisan budaya. Masyarakat Desa Kampung Baru memiliki corak budaya yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari strata sosial yang berbeda. Tetapi walaupun demikian mereka dapat hidup saling berdampingan sehingga terbinanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan harmonis tanpa harus membedakan status sosial maupun budaya. Masyarakat desa Kampung Baru terdiri dari berbagai macam suku yakni, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak dan suku Tionghoa. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Desa Kampung Baru adalah bahasa daerah dan beragam sekali tidak tergantung kepada adat, melainkan sesuai dengan perkembangan zaman dan selera penduduk itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik dilapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tentunya pemerintah senantiasa melakukan tindakan hukum baik dalam hukum publik maupun dalam hukum privat. Tindakan hukum publik didasarkan pada ketentuan hukum publik sedangkan tindakan hukum privat didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pemerintah tentunya menggunakan instrumen-instrumen pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jzaim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian pakar dan tambahan pemahaman Jzaim Hamidi tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian AAUPB secara komprehensif, yaitu :²³

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.

Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

²³Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien.²⁴ *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.²⁵

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

²⁴Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus 2012, hlm. 2.

²⁵Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April 2012, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala-kepala Daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1) Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3) Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4) Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5) Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6) Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9) Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10) Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

2. Ciri-Ciri Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

- 1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- 2) Menjamin adanya supremasi hukum.
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- 4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.²⁶

Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.²⁷ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.²⁸

²⁶Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 32.

²⁷SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2001), hlm. 57.

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44.

B. Tinjauan Tentang Pendataan Administrasi

1. Pendataan

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendataan adalah proses, cara, perbuatan mendata, pengumpulan data, dan pencarian data. Pendataan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencatat dan memasukkan data kedalam sebuah catatan. Secara umum menurut Biro Pusat Statistik pengertian pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris.²⁹

Setiap kelahiran dan kematian adalah peristiwa penting untuk dicatatkan dan dilaporkan kepada instansi terkait. Laporan dan pencatatan ini berfungsi sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan ataupun orang lain, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal kelahiran anak, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap kelahiran anak harus dilaporkan dan didaftarkan agar mendapatkan akta kelahiran, hal ini karena peristiwa kelahiran adalah peristiwa kependudukan yang akan membawa perubahan pada status anak dan/ atau orang tua anak tersebut.

²⁹Ulpa Fauziah, *Perancangan Sistem Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi*, Faktor Exacta, Vol.6 No.2, Desember 2013, hlm. 191.

Proses pelaporan, pencatatan, dan pendaftaran atas semua peristiwa tersebut adalah bagian dari proses administrasi kependudukan, yaitu :³⁰ Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Administrasi

1) Pengertian Administrasi

Istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *administration*. Sedangkan istilah administrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin “*ad+ministrare*” yang merupakan bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membantu, melayani, menunjang atau memenuhi. Sedangkan kata sifat dari *ad+ministrare* adalah *administrativus*, dan kata bendanya adalah *administratio*. Dalam penerapan istilah administrasi, pengaruh penjajah Belanda sangatlah kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Istilah administrasi lebih dikenal dan sering digunakan karena penerjemahannya berasal dari bahasa Belanda yaitu *administatie*, yang untuk lidah bangsa Indonesia terasa lebih mudah dan hampir sama. Dalam perkembangan selanjutnya penerjemahan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration* tidak digunakan sehari-hari dalam percakapan oleh orang Indonesia, kecuali sewaktu dibicarakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kedua istilah itu, yang satu

³⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berasal dan diterjemahkan dari bahasa Inggris, sedangkan yang lainnya merupakan terjemahan atau warisan dari peninggalan Belanda mempunyai arti yang berbeda satu dengan lainnya.³¹ Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dsb. yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dengan demikian, tata usaha adalah bagian kegiatan dari Administrasi.

2) Kriteria Pokok Administrasi

Kegiatan administrasi baik yang terjadi dalam organisasi pemerintah maupun organisasi swasta ataupun yang berlangsung dalam organisasi yang besar atau sederhana, titik pusat perhatiannya ialah terlaksananya efisiensi pekerjaan. Luther Gulick menjelaskan bahwa ilmu administrasi baik yang ada pada pemerintah maupun swasta, dasar utama yang menjadi tujuannya adalah mencapai efisiensi. Tujuan pokok dari ilmu administrasi adalah terlaksananya suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan pengeluaran tenaga kerja dan perbekalan yang sedikit-dikitnya).³² Terdapat kriteria pokok administrasi yang terdiri atas tiga bagian, yaitu:³³

a. Rasionalitas

Kerja sama dua orang atau lebih mengandung pengertian bahwa setiap orang sudah berpikir bahwa apabila ia bekerja sendirian atau bekerja

³¹Ayi Karyana dkk, *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 9.

³²Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

³³Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sendirisendiri maka kegiatan yang akan dicapai tidak mungkin atau sulit untuk terlaksana. Dengan sendirinya tindakan selanjutnya akan mengarah pada usaha-usaha yang bersifat rasional. Dapat dikatakan bahwa sebagai manusia administrasi adalah manusia yang selalu menggunakan akal pikiran yang rasional dan sehat, memperkecil risiko kerugian, pemborosan sehingga tujuan yang sebenarnya dapat tercapai.

b. Efektivitas

Efektivitas sebagai motif administrasi berkaitan dengan hal yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Apabila sasaran atau tujuan sudah tercapai sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditentukan, maka kegiatan ini sudah dikatakan efektif. Namun, efektivitas tidak mempertimbangkan masalah keuntungan dan kerugian, tetapi yang penting hasilnya adalah sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan. Pada umumnya, pekerjaan dalam suatu organisasi pemerintah hanya menitikberatkan pada hasil yang ingin dicapai, sasaran/tujuan sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditentukan. Sekalipun usaha-usaha ke arah penghematan dan menghilangkan pemborosan selalu terus dilakukan.

c. Efisiensi

Efisiensi sebagai motif administrasi sangat menentukan keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena efisiensi selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Segala kegiatan usaha swasta/niaga selalu menggunakan motif efisiensi. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara hasil dan biaya, di mana hasil harus lebih besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada biaya. Dengan kata lain, efisiensi adalah usaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber dana yang terbatas.

C. Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak

1. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program KIA menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota.³⁴ Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hal terbaik bagi seluruh anak Indonesia.

³⁴Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

2. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 2 menyatakan Tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu (1) untuk meningkatkan pendataan, (2) perlindungan dan pelayanan publik, dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.³⁵ Khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Manfaat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, ditargetkan KIA nantinya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, dasar pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak dan untuk berbagai keperluan terkait lainnya yang membutuhkan bukti diri berupa identitas anak.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)

Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, tidak terkecuali

³⁵Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan pendataan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak khususnya di desa Kampung Baru kenyataan masih kurang terselenggara secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni masih banyak anak yang tidak memiliki KIA, serta informasi maupun sosialisasi yang kurang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga informasi yang sudah mereka sampaikan tidak langsung sampai ke masyarakat, sehingga ini mengakibatkan masih banyak orangtua anak yang tidak memahami apa yang disebut KIA. Seperti informasi dari pihak Disdukcapil melalui media cetak seperti spanduk ataupun baliho yang dalam hal ini tidak semua kecamatan memasang spanduk ataupun baliho mengenai KIA, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahuinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemerintah dalam menerbitkan KIA yang bertujuan sebagai upaya peningkatan pendataan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak belum terlaksana sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mestinya. Masih banyak anak yang belum memiliki KIA dan pemerintah pun kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi mengenai KIA.

2. Adapun faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan administrasi khususnya di desa Kampung Baru yakni diantaranya:

- Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Mengenai Kartu Identitas Anak;
- Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Keperluan Kartu Identitas Anak Tidak Tinggi;
- Kondisi Geografis yang Jauh;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Petugas Pelayanan Kependudukan;
- Adanya oknum yang memanfaatkan situasi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, dapat penulis berikan saran dan masukan dalam pengurusan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan pendataan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu proses sosialisasi, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar masyarakat dapat lebih paham akan fungsi dari kartu identitas anak itu sendiri.

3. Bagi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan agar lebih giat menyampaikan hal-hal terkait KIA ke sekolah-sekolah yang ada di desa Kampung Baru. Sehingga akan timbul kerjasama dengan pihak sekolah dan anak-anak sekolah lebih banyak yang mengetahui KIA serta tertarik ingin membuat KIA.
4. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi. 2020. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2020*. Kuantan Singingi: Badan Pusat Statistik.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handyaningrat, Soewarno. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Karyana, Ayi, Enceng, dan Darmanto. 2008. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- M, Hajar. 2011. *Model-Model Dalam Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Marbun, SF. 2001. *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

C. Jurnal

Aulia Aziza Mei Erdani, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017.

Elina Aryanti, *Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.

Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Volume 29, Nomor 319, April 2012.

Ulpa Fauziah, *Perancangan Sistem Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi*, Faktor Exacta, Volume 6, Nomor 2, Desember 2013.

Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

D. Internet

Didik Supriyanto. 2020. "Salah Paham Pemilu 3:1 : Penyelenggaraan vs Pelaksanaan, Lebih Luas Mana?". <https://rumahpemilu.org/salah-paham-pemilu-1-1-penyelenggara-pemilu-vs-pelaksana-pemilu/>. (diakses 4 April 2021).

Disdukcapil. <https://disdukcapil.kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>. (diakses 15 Maret 2020)

Muhammad Iqbal. 2016. "Ini Penjelasan Lengkap Mendagri Soal Kartu Identitas Anak". <https://news.detik.com/berita/d-3140935/ini-penjelasan-lengkap-mendagri-soal-kartu-identitas-anak> (diakses 25 Desember 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indeks Berita. 2020. “Kepala Dinas Discukcapil Himbau kepada Masyarakat Urus Kartu Identitas Anak (KIA)”. <https://m.kupaskasus.com/read-4233-2020-07-03-kepala-dinas-discukcapil-himbau-kepada-masyarakat-urus-kartu-identitas-anak-kia.html>. (diakses 25 Desember 2020).

Kominfo Kuansing. 2020. “Per Juni 2020, Jumlah Penduduk Kuansing Capai 334 Ribu Orang”. <https://kuansing.go.id/id/blog/per-juni-2020-jumlah-penduduk-kuansing-capai-334-ribu-orang.html>. (diakses 25 Desember 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. “Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”. <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/091400>. (Diakses 25 Desember 2020).

Kementrian Agama RI. 2020. “Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam Jenjang Madrasah TP. 2020/2021”. http://emisdep.kemenag.go.id/madrasah_emis/dashboard/index.php?content=madrasah&action=detail&prov=14&kab=KUANTAN%20SINGINGI. (Diakses 25 Desember 2020).

Riau.go.id. 2019. “Kabupaten Kuantan Singingi-Berita-Pemerintah Provinsi Riau”. <https://www.riau.go.id/home/content/20/kabkuantansingingi#:~:text=Kabupaten%20Kuantan%20Singingi%20pada%20awalnya,Ibu%20Kotanya%20berkedudukan%20di%20Teluk>. (diakses 15 Maret 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil



Bersama Kepala Desa Kampung Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama responden yang mengisi angket

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bersama responden yang mengisi angket

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kartu Identitas Anak untuk anak yang berusia 5-17 tahun dengan tahun lahir ganjil



Kartu Identitas Anak untuk anak yang berusia 5-17 tahun dengan tahun lahir genap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kartu Identitas Anak untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan tanpa pas foto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK, ditulis oleh saudara :

Nama : Wikda Hasti Bintari
NIM : 11727200183
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 19 Februari 2021
Narasumber : Nurhidayat, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

Nurhidayat, S.H., M.H.

NIP. 19750801 200701 1 023

NIP. 130217038

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampian - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2437/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIKDA HASTI BINTARI
NIM : 11727200183
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an Rektor
Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2438/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Kepada
Yth. Musrifah, SH.MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : WIKDA HASTI BINTARI
NIM : 11727200183
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39216
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2438/2021 Tanggal 26 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

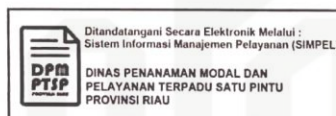
1. Nama	: WIKDA HASTI BINTARI
2. NIM / KTP	: 11727200183
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
7. Lokasi Penelitian	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmtsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 73/DPMTSP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39216 Tanggal 02 MARET 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	WIKDA HASTI BINTARI
NIM	:	11727200183
Jurusan	:	ILMU HUKUM
	:	FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,
MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp/Fax.(0760) 561629 Kode Pos 29362 E-Mail : disdukcapil@kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045/Disdukcapil-Sekr/66

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa:

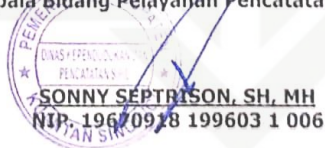
NAMA : WIKDA HASTI BINTARI
NIM : 11727200183
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : ILMU SYARIAH DAN HUKUM UIN Suska Riau
JENJANG PENDIDIKAN : SI
JUDUL SKRIPSI : PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDATAAN ADMINISTRASI ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 02 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 23 April 2021

An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana penyelenggaraan kartu identitas anak di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan kartu identitas anak di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memberikan informasi mengenai kartu identitas anak baik melalui media sosial ataupun melalui media cetak seperti surat kabar lokal, reklame dan spanduk?
4. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan aparat pemerintah desa atau kecamatan serta dengan pihak sekolah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan penyelenggaraan kartu identitas anak?
5. Bagaimana respon orangtua anak di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap adanya kartu identitas anak?
6. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung mengenai kartu identitas anak?
7. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan anak-anak khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memiliki kartu identitas anak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Bagaimana penyelenggaraan kartu identitas anak di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan kartu identitas anak di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak disebutkan bahwa kartu identitas anak ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendataan anak. Apakah dengan penyelenggaraan kartu identitas anak ini di Kabupaten Kuantan Singingi membantu dalam peningkatan pendataan anak?
4. Apakah setiap harinya terdapat anak yang membuat Kartu Identitas Anak?
5. Apakah dalam pembuatan kartu identitas anak terdapat peningkatan setiap harinya? Dan apakah upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penyelenggaraan kartu identitas anak guna peningkatan pendataan administrasi anak di Kabupaten Kuantan Singingi?
6. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memberikan informasi mengenai kartu identitas anak baik melalui media sosial ataupun melalui media cetak seperti surat kabar lokal, reklame dan spanduk?
7. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan aparaturnya pemerintah desa atau kecamatan serta dengan pihak sekolah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan penyelenggaraan kartu identitas anak?
8. Bagaimana respon orangtua anak di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap adanya kartu identitas anak?
9. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan sistem informasi lengkap yang mudah diakses oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat mengenai kartu identitas anak? Dan apakah alur pengurusan kartu identitas anak mudah dipahami oleh masyarakat?

10. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan anak-anak khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memiliki kartu identitas anak?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

1. Bagaimana peyelenggaraan kartu identitas anak di desa Kampung Baru Cerenti?
2. Apakah anak-anak di desa Kampung Baru sudah banyak yang memiliki kartu identitas anak?
3. Bagaimana respon orangtua di desa Kampung Baru Cerenti dengan adanya kartu identitas anak?
4. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi ataupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan telah melakukan kerjasama dengan desa Kampung Baru dalam hal penyuluhan mengenai kartu identitas anak?
5. Apa saja faktor penghambat dalam peyelenggaraan kartu identitas anak di desa Kampung Baru Cerenti?

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang digunakan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Peningkatan Pendataan Administrasi Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (\checkmark) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Wikda Hasti Bintari

NIM : 11727200183

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

D. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

E. Pertanyaan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Kartu Identitas Anak?		
2.	Apakah Bapak/Ibu telah membuat Kartu Identitas Anak untuk		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	anak Bapak/Ibu?		
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui keuntungan mempunyai Kartu Identitas Anak?		
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Kartu Identitas Anak itu adalah identitas resmi khusus untuk anak yang berusia kurang dari 17 tahun?		
5.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau melihat informasi mengenai Kartu Identitas Anak baik melalui media elektronik ataupun media sosial?		
6.	Apakah Bapak/Ibu pernah melihat informasi mengenai Kartu Identitas Anak melalui media cetak seperti surat kabar, reklame ataupun spanduk?		
7.	Menurut Bapak/Ibu apakah Kartu Identitas Anak itu penting?		
8.	Apakah anak Bapak/Ibu pernah meminta agar segera di buatkan Kartu Identitas Anak?		
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat dan langkah-langkah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak?		
10.	Apakah syarat dan langkah-langkah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak mudah untuk di pahami?		
11.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satu-satunya instansi yang berwenang dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak?		
12.	Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cerenti pernah memberikan informasi mengenai Kartu Identitas Anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti?		
13.	Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cerenti pernah mengadakan penyuluhan mengenai Kartu Identitas Anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti?		
14.	Jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cerenti pernah mengadakan penyuluhan mengenai Kartu Identitas Anak, apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti penyuluhan tersebut?		
15.	Menurut Bapak/Ibu, apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cerenti kurang dalam hal memberikan informasi mengenai Kartu Identitas Anak?		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mengingat :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 14

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III

SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
 - b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
 - c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (*retransfer*);
 - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - e. karakteristik fisik sesuai *ISO/IEC 7810* dalam format ID -1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay (0,065 mm)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:

- a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
- b) area Logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
- c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
- d) *secutity feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis- garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.

3. PETG (0,095 mm)

4. Core (0,330 mm)

5. PETG (0,095 mm)

6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:

- a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
- b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
- c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
- d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
- e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *overlay* (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, penerbit, dan tahun terbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



WIKDA HASTI BINTARI biasa di panggil Tari lahir di Cerenti, 13 Januari 2000, anak Kelima dari Lima saudara dan merupakan anak dari pasangan Alm. Bapak Dwi Wisnu Kristiyanto dan Ibu Werdio Prihartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 007 Kampung Baru, Kecamatan Cerenti pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) di SMPN 1 Cerenti dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA N 1 Cerenti yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN, dan penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada tahun 2019, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selama Empat Puluh Lima hari. Pada tahun 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul *"Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak"*. Akhirnya tepat pada hari Selasa pada tanggal 27 Juli 2021 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan prediket Cum Laude.